



WALI KOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

10. Peraturan. . .

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
16. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1614);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Kota Batam Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah otonom untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II. . .

BAB II  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I           PENDAHULUAN
  - b. BAB II          HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
  - c. BAB III        TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
  - d. BAB IV        RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
  - e. BAB IV        PENUTUP

Pasal 3

Penjabaran Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan menjadi Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. acuan penyusunan RKA-Perangkat Daerah;
- b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah disusun berlandaskan RKPD.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2025

WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHAMAD

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,



FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025 NOMOR 1621

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR : 51 TAHUN 2025  
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS TENAGA KERJA TAHUN 2026





# RENCANA KERJA (RENJA) DINAS TENAGA KERJA



Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

<https://disnaker.batam.go.id>

Jl. Raja Haji no. 1 Sungai Harapan - Sekupang

## TAHUN 2026

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2026.

Semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna menyukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam

Batam, 18 September 2025

Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja  
Kota Batam



Nurul Iswahyuni, AMP., S.E.  
NIP. 19680429 198909 2 001

# BAB I

## PENDAHULUAN

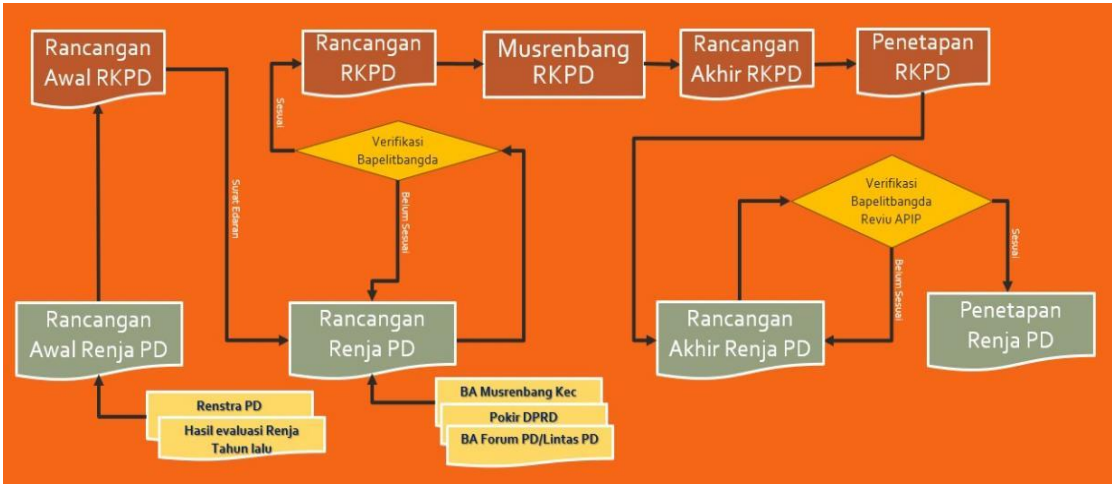
## 1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah, diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai kelengkapannya.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas , Kota Batam yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Dokumen ini memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang urusan , strategi, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikamelalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Renja disusun dengan tahapan sebagaimana tergambar pada alur di bawah ini, sebagai berikut:

- persiapan penyusunan Renja;
- penyusunan rancangan awal Renja;
- pelaksanaan forum perangkat daerah;
- Perumusan rancangan akhir Renja;
- Penetapan Renja.



### Gambar 1 Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Adapun Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sementara itu Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD.

Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam disusun dengan tujuan mewujudkan pencapaian Misi Kota Batam yang ke-3 (Tiga) yaitu *Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing , Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia* Adapun sasaran yang akan dicapai yaitu *Menurunnya Masalah ketenagakerjaan dan berkurangnya jumlah pengangguran.*

## **1.2 Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 127);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 130);
9. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 204 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Kota Batam Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1072);
10. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1614).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam adalah menyediakan dokumen yang berisi rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam untuk periode 1 (satu) tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam antara lain:

- a. Sebagai koridor pelaksanaan program kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam tahun 2026;
- b. Sebagai bahan acuan penyusunan RKA SKPD Tahun 2026.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam tahun 2026, meliputi :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan latar belakang penulisan (1.1), dasar hukum (1.2), maksud dan tujuan (1.3), dan sistematika penulisan (1.4).

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM TAHUN LALU**

Menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu (2.1), analisis kinerja pelayanan OPD (2.2), isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD (2.3), review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (2.4) dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat (2.5).

#### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM**

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja, serta program dan kegiatan.

#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM**

Memuat rencana kerja dan pendanaan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam tahun 2026.

## **BAB V     PENUTUP**

Menguraikan kesimpulan-kesimpulan materi pokok dalam penjabaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Batam tahun 2026.

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA**  
**DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM TAHUN LALU**

Untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan rencana pembangunan perlu dilakukan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan mengidentifikasi apakah pelaksanaan pembangunan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, sehingga dapat diketahui efektivitas pelaksanaan proses perencanaan pembangunan dan kendala – kendala dalam pelaksanaan pembangunan.

**2.1 Evaluasi Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Batam**

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan dan hasil rencana program dan kegiatan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan tahun 2024 sebagaimana Tabel 2.1 dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dari target 100% hingga bulan Desember 2024 tercapai 100%.
  - b. Program Hubungan Industrial dari target 98% hingga bulan Desember 2024 tercapai 98%.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
  - a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dari target 18.32% hingga bulan Desember 2024 tercapai 183%.
  - b. Program Penempatan Tenaga Kerja dari target 52% hingga bulan Desember 2024 tercapai 108%.
3. Faktor-faktor pendukung terpenuhinya/melebihi target kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan terlaksana sesuai rencana;
  - b. meningkatnya pelaksanaan pengendalian dan monitoring;
  - c. koordinasi dengan instansi vertikal cukup baik; dan
  - d. dukungan ketersediaan sarana prasarana yang cukup baik.
4. Implikasi terhadap tercapainya target capaian program Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 adalah mendukung pada pencapaian target sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Batam sampai dengan tahun 2024 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini:

**Table 1 (2.1) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s.d Tahun 2025**  
**Dinas Tenaga Kerja Kota Batam**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja						.			
	Bidang Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar									
2.07.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	- Nilai Sakip Perangkat Daerah - Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	- 72,66% - 86%	1 Tahun	100%	100%	100%	100%	47.82%	
2.07.012.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun	100%	-	-	-	-	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		<b>sesuai dengan tahapan dan waktu</b>								
2.07.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	-	-	-		-	-	
2.07.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	-	-	-		-	-	
<b>2.07.01.2.0 2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>52.97%</b>	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.07.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/Bulan	686 Orang/Bulan	54 Orang/Bulan	54 Orang/Bulan	100%	61 Orang/Bulan	61 Orang/Bulan	100%
2.07.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	6 Dokumen	100%
<b>2.07.01.2.0 5</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>27.16%</b>	<b>27.16%</b>
2.07.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	63 Paket	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.07.01.2.0 5.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	-	-	-		11 Orang	3 Orang	27.27%
<b>2.07.01.2.0 6</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>50.55%</b>	<b>50.55%</b>
2.07.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
2.07.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Paket	61 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	3 Paket	75%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.07.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	-	-	-	-	4 Paket	2 Paket	50%
2.07.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	21 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
2.07.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	53 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%
<b>2.07.01.2.0 7</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>21.01%</b>	<b>21.01%</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.07.01.2.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	-	-	-	-	-	-	-
2.07.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	398 Unit	-	-	-	-	56 Unit	54 Unit	96.42%
2.07.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	51 Unit	26 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	27 Unit	7 Unit	25.92%
2.07.01.2.0 7.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>2.07.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>46.26%</b>	<b>46.26%</b>
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	72 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%
<b>2.07.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>32.64%</b>	<b>32.64%</b>
2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	6 Unit	4 Unit	66.66%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.07.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	-	-	-	-	-	-	-
2.07.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	106 Unit	174 Unit	102 Unit	102 Unit	100%	87 Unit	23 Unit	26.43%
2.07.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.07.03	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi</b>	<b>48,06%</b>	<b>16.38%</b>	<b>18.32%</b>	<b>18.32%</b>	<b>100%</b>	<b>19.59%</b>		
2.07.03.2.01	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi</b>	<b>100%</b>	<b>16.38%</b>	<b>18%</b>			<b>22%</b>		
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	34.01%	767 Orang	1661 Orang	1661 Orang		1478 Orang	711 Orang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>2.07.03.2.0 2</b>	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina</b>	<b>13.33 %</b>	<b>16.38%</b>	<b>16.67%</b>			<b>16.67%</b>	<b>0%</b>	
2.07.03.2.0 2.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	20 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	100%	10 Lembaga	0 Lembaga	0%
<b>2.07.03.2.0 5</b>	<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase Jumlah Pekerja yang terfasilitasi dalam peningkatan Produktivitas</b>	<b>27.68%</b>	<b>16.38%</b>	<b>0.38%</b>			<b>0.49%</b>	<b>41.02%</b>	
2.07.03.2.0 5.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1500 Dokumen	717 Dokumen	839 Dokumen	839 Dokumen	100%	1172 Dokumen	544 Dokumen	46.41%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang terserap /ditempatkan	73,5%	51%	52%			53%	32.85%	61.98%
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase angkatan kerja (orang yang bekerja dan pencari kerja) yang terlayani	52%	33%	-	-		27.41%	14.67%	53.52%
2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	50 Orang	-	-			50 orang	0 Orang	0%
2.07.04.2.01.0001	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	25 Orang	10 Orang	10 Orang			100%	25 Orang	8 Orang 32%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.07.04.2.0 1.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	30 Orang	-	-	-	-	30 Orang	0 Orang	0%
<b>2.07.04.2.0 3</b>	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>Persentase ketersediaan informasi kerja yang ditindaklanjuti pencari kerja</b>	<b>76%</b>	<b>51%</b>	<b>45%</b>	<b>45%</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>	<b>47.25%</b>	
2.07.04.2.0 3.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	2100 Orang	2000 Orang	1200 Orang	1200 Orang	100%	2000 Orang	357 Orang	17.85
<b>2.07.04.2.0 4</b>	<b>Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Cakupan perlindungan CPMI dan PMI</b>	<b>52.38%</b>	<b>51%</b>	<b>18.29%</b>	<b>18.29%</b>	<b>100%</b>	<b>21.95%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	500 orang	-	-		-	500 Orang	0 Orang	0%
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1. Persentase Pekerja Rentan yang mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan 2. Persentase Penyelesaian Masalah dan Kesejahteraan Sosial Ketenagakerjaan	24.11%	97%	98%	98%	100%	98%	26.8%	27.34%
2.07.05.2.01	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian pengesahan peraturan, perjanjian kerja hubungan industri dan jaminan sosial serta pengupahan perusahaan tenaga kerja	28.96%	97%	100%	100%	100%	100%	37.99%	37.99%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.07.05.2.0 1.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	200 Perusahaan	-	-	-	-	200 Perusahaan	0 Perusahaan	0%
2.07.05.2.0 1.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Lpaoran	100%	10 Laporan	2 Laporan	20%
<b>2.07.05.2.0 2</b>	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial serta bantuan iuran JKK dan JKM</b>	<b>19.25%</b>	<b>97%</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>	<b>100%</b>	<b>98%</b>	<b>11.97%</b>	<b>12.21%</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.07.05.2.0 2.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	100 Perkara	-	-	-	-	20 Perkara	0 Perkara	0%
2.07.05.2.0 2.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	10 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	1 Lembaga	1 Lembaga	100%
2.07.05.2.0 2.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	10285 Orang	-	-	-	-	-	-	-

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

Pada masa pemerintahan periode 2025-2029 ini, adapun misi, tujuan dan sasaran RPJMD yang terkait dengan peran Tenaga Kerja Kota Batam ada dalam **Misi Ketiga**, yakni Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing, produktif dan berakhlak mulia dan **Misi Kelima, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Good Governance**. Untuk menciptakan Kota Batam sebagai kota industri, perdagangan dan pariwisata, serta *centre of excellence*, maka pengembangan dukungan infrastruktur, utilitas dan sistem transportasi yang maju menjadi keharusan. Selain itu, penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaku bisnis melalui kota yang ramah, aman dan nyaman juga menjadi keharusan.

Untuk menjalankan sasaran PD Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, berikut adalah pembagian Sasaran Perangkat Daerah berdasarkan Program di Dinas Tenaga Kerja Kota Batam:

1. Sasaran PD Meningkatkan Pendayagunaan Tenaga Kerja, Pemerataan Kesempatan Kerja, Perlindungan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Pekerja
  - Program Hubungan Industrial
  - Program Penempatan Tenaga Kerja
  - Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
  - Program Perencanaan Tenaga Kerja

Selanjutnya, untuk menjelaskan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dapat ditampilkan pada tabel sebagai berikut :

Table 2 (2.2) Pencapaian Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah  
*Dinas Tenaga Kerja Kota Batam*

No.	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n n	Tahun n+1	
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2026	2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja			100%	56%	50%	50%	100%	-	-	-	-	
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi			70.57 %	1.318 3%	1.132 8%	1.290 1%	70.57 %	-	-	-	-	
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja			31.19 %	34.33 %	37.46 %	40.6%	31.19 %	-	-	-	-	
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).			29%	29%	28%	28%	29%	-	-	-	-	
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten			72.36 %	72.92 %	73.75 %	74.58 %	72.36 %	-	-	-	-	

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam**

Urusan Ketenagakerjaan adalah salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Batam, Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam mengacu pada tugas dan fungsi organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Batam Nomor 28 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Dinas Tenaga Kerja adalah memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Ketenagakerjaan daerah sesuai dengan kewenangannya.

Sedangkan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam adalah :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan.
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketenagakerjaan.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan di bidang ketenagakerjaan.
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

Keberhasilan pembangunan pada bidang ketenagakerjaan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian suatu daerah karena tenaga kerja menjadi salah satu faktor penentu yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktivitas perekonomian.

Terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tidak terlepas dari dokumen perencanaan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Dalam penyusunan dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, pencapaian Visi dan Misi Kota Batam menjadi salah satu fokus dan tujuan utama yang harus dipenuhi. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD, Misi III Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing, produktif dan berakhlak mulia.

Kendala dan permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Skill pencari kerja yang lebih rendah tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan.
2. Penyebaran informasi pasar kerja yang belum maksimal, sehingga minimnya kesempatan kerja.
3. Masih banyaknya terjadi pelanggaran Undang-Undang Ketenagakerjaan antara lain seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat berdiri suatu perusahaan, kurang terbinanya hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja di suatu perusahaan yang berdampak kepada timbulnya perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja.
4. Upah sektoral, Undang-Undang/Peraturan yang tidak memberikan ukuran tertentu mengenai upah sektoral dan besaran upah sektoral melalui kesepakatan yang sepenuhnya dilakukan kepada pihak pekerja dengan pengusaha.
5. Pembahasan UMK oleh Dewan Pengupahan dan kemudian diusulkan kepada Gubernur sering menimbulkan gejolak (demo pekerja) sehingga dapat mengganggu investasi.
6. Belum terpenuhinya kebutuhan tenaga mediator.
7. Belum tersedianya Balai Latihan Kerja.
8. Banyak angkatan kerja dari luar Batam yang akhirnya menimbulkan tingginya angka pengangguran di Kota Batam.
9. Belum adanya pendampingan terhadap wirausaha baru
10. Belum optimalnya koordinasi dengan pimpinan kawasan industri lintas sektoral dalam menangani masalah lowongan dan penempatan tenaga kerja.

Untuk menanggulangi kendala dan masalah tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja dan peningkatan kemampuan bagi tenaga kerja yang sudah bekerja sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri khususnya Kota Batam.
2. Memberikan informasi kerja melalui Bursa Kerja dan melakukan kerjasama dengan perusahaan.
3. Melakukan pembinaan secara berkelanjutan baik klasikal maupun kunjungan ke Perusahaan.
4. Melakukan kajian tentang sektor unggulan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dan membuat kesepakatan antara asosiasi perusahaan dengan serikat pekerja pada sektor yang bersangkutan.
5. Menetapkan struktur dan skala upah pekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan yakni PP nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
6. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dengan mengikut sertakan aparatur pada diklat mediator dan bimbingan teknis lainnya diluar daerah.
7. Melakukan pembangunan Balai Latihan Kerja.
8. Mengalihkan pembangunan industri ke daerah lain hingga kesempatan kerja tidak hanya bisa didapat di Kota Batam.
9. Menyediakan pendampingan bagi wirausaha baru yang telah dibentuk supaya dapat berkembang dan berfungsi sebagai penyedia/membuka lapangan pekerjaan.
10. Meningkatkan koordinasi dengan pimpinan kawasan industri lintas sektoral dalam menangani masalah lowongan dan penempatan tenaga kerja sesuai dengan Permenaker Nomor 39 tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja.

Isu Sumber Daya Manusia (SDM) dan ketenagakerjaan menjadi isu utama di era automasi dan ekonomi digital yang saat ini tengah berkembang dengan cepat. Baik peluang dan tantangan SDM dan ketenagakerjaan harus dihadapi dengan memandang kondisi terkini ketenagakerjaan Indonesia di era automasi dan ekonomi digital saat ini. Dengan melihat beberapa peluang sebagai berikut:

a. Booming Ekonomi Digital dan Automasi

Pemanfaatan teknologi di saat yang bersamaan juga menyediakan peluang terciptanya pekerjaan baru, meningkatnya produktivitas, dan mengantarkan pelayanan publik yang efektif. Selanjutnya, dinamika ekonomi terkini juga direfleksikan dengan hadirnya era automasi. Era automasi yang diperkirakan akan melahirkan revolusi industri 4.0 ini berdiri di atas tren bergesernya perekonomian dari resources-based (berbasis sumber daya) menjadi knowledge-based economy (ekonomi berbasis ilmu pengetahuan). Pergeseran terjadi seiring dengan kesadaran bahwa sumber daya alam memiliki keterbatasan sementara itu disisi lain kekayaan intelektual jika dikelola dengan optimal akan bisa menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi yang tidak ada batasnya. Orang-orang di negara maju mencemaskan dampak teknologi terhadap pekerjaan.

Pekerjaan yang rutin memiliki kemungkinan tinggi untuk digantikan oleh mesin. Tetapi, teknologi di saat yang bersamaan juga menyediakan peluang terciptanya pekerjaan baru, meningkatnya produktivitas, dan mengantarkan pelayanan publik yang efektif.

b. Angkatan Kerja Muda (Bonus Demografi)

Peluang pembangunan Ketenagakerjaan berikutnya adalah peningkatan penduduk usia kerja yang merupakan modal besar untuk pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pemerintah harus memperhatikan

kondisi kependudukan ini sebagai kesempatan untuk mempersiapkan para calon pekerja dan anak-anak yang akan masuk pasar kerja agar mereka menjadi sumber daya yang berkualitas tinggi, memiliki keterampilan dan kompetensi untuk menghadapi persaingan global tenaga kerja baik di tingkat ASEAN (MEA) atau di dunia.

c. Perubahan Kebutuhan Keterampilan dan Model Pembelajaran.

Sebagai konsekuensi dari tren automasi dan tuntutan untuk berinovasi, dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki spesialisasi dan keahlian yang mendalam. Di sisi lain, teknologi juga mendorong bertambahnya jenis dan jumlah pekerjaan yang sama kondisinya yaitu menuntut spesialisasi dan keahlian baru. Kebijakan ketenagakerjaan atau lebih luasnya kebijakan terkait dengan SDM harus dapat menjawab tantangan tersebut. Institusi pendidikan juga harus mulai mengubah arah orientasi kurikulum yang mampu mengimbangi dinamika tersebut. Peningkatan keahlian digital perlu diterapkan pada berbagai institusi pendidikan menengah dan Pemerintah harus memikirkan mekanisme pembiayaan yang layak. Pekerja lebih cenderung terlibat dalam pembelajaran orang dewasa (adult learning) ketika ada jaminan akan kelangsungan pendapatan dan penerimaan kembali di pasar tenaga kerja. Mengingat pentingnya training yang dilakukan di tempat kerja, perusahaan perlu berkontribusi terhadap pembiayaannya. Dalam kasus dimana perusahaan menjalankan sendiri program training-nya, mereka bisa bekerja bersama dengan organisasi pekerja untuk mendesain kerangka yang relevan. Organisasi pekerja / buruh memiliki peran utama dalam ekosistem ini.

d. Potensi Pariwisata

Di tengah kelesuan ekonomi global yang diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa tahun mendatang, sebenarnya masih terbuka peluang bagi Indonesia khususnya di Kota Batam yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia untuk dapat meningkatkan kualitas perekonomiannya.

Optimisme ini salah satunya muncul dari perkembangan positif yang terjadi di sektor pariwisata Indonesia.

Terlepas dari berbagai kendala yang masih menghimpit, sektor pariwisata menjadi sektor yang semakin dapat diandalkan dalam upaya menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah produk, serta menjadi salah satu sumber penerimaan devisa. Dukungan dan strategi kebijakan yang tepat dari pemerintah dalam mengembangkan sektor ini ke depan akan menjadi salah satu kunci utama keberhasilan memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi, terutama terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah. Perkembangan sektor perjalanan dan pariwisata semakin menggembirakan sejalan pemulihan ekonomi global dari krisis. Pertumbuhan sektor ini pun diperkirakan akan mengikuti bahkan akan menyamai sektor-sektor utama perekonomian dunia seperti sektor jasa keuangan maupun transportasi dan manufaktur. Keberadaan sektor pariwisata secara langsung dapat menggerakkan bisnis akomodasi, transportasi, hiburan, dan pertunjukan. Pariwisata juga membantu perkembangan industri jasa penginapan, jasa makanan dan minuman, perdagangan eceran, jasa transportasi, industri budaya, olahraga, dan jasa rekreasi.

Adapun tantangan yang harus dihadapi dengan memandang kondisi terkini ketenagakerjaan di Kota Batam di era automasi dan ekonomi digital saat ini :

a. Kualitas Angkatan Kerja

Kualifikasi tenaga kerja secara agregat yang masih rendah tentu menjadi tantangan utama bagi Dinas Tenaga Kerja dalam mengejar

produktivitas industri dan juga untuk menghadapi era automasi dan revolusi industri 4.0. Transformasi ke arah automasi, ekonomi digital, dan revolusi industri 4.0 membutuhkan keseriusan dalam peningkatan kualitas SDM. Tantangan untuk meningkatkan kualitas SDM khususnya angkatan kerja sangat berhubungan dengan bagaimana negara berinvestasi pada sumber daya manusianya. SDM menjadi kunci untuk dapat bersaing dalam masa depan perekonomian.

b. Tantangan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Perluasan kesempatan kerja dengan mendorong industri manufaktur tampak mengalami perbaikan. Industri manufaktur sebagai sektor yang berpotensi besar dalam menciptakan kesempatan kerja yang baik (decent job) harus diakselerasi. Terutama meningkatkan high-skilled labour. Untuk meningkatkan nilai tambah produksi yang berdampak pada diperluasnya kesempatan kerja, industri akselerasi kompetensi pekerja di sektor industri perlu dilakukan.

c. Tantangan Hubungan Industrial

Era digital dan automasi telah mengubah cara bisnis dan industri beroperasi, mengelola, serta mengorganisasikan sumber daya yang dimiliki. Minim nya jumlah mediator dalam menangani perselisihan menjadi tantangan kedepan untuk mengkader dan memberikan diklat kepada calon mediator .

d. Peningkatan Keahlian dan Produktivitas Tenaga Kerja

Untuk menjawab tantangan keterampilan dan keahlian SDM tersebut, salah satu solusinya adalah meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja selain dengan memberikan pelatihan kerja juga menyediakan Balai Latihan Kerja (BLK) yang bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan teknis berproduksi atau keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan bagi komunitas masyarakat sekitarnya. Dengan begitu diharapkan setelah mendapat bekal keterampilan berproduksi atau keahlian tertentu tersebut masyarakat dapat berwirausaha atau mencari kerja.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Beberapa isu strategis Kota dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025 – 2029 adalah:

- a. Persaingan Global
- b. Pelayanan Perizinan Terpadu;
- c. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Disparitas Pembangunan Wilayah dan Menjamin Pemerataan Pembangunan;
- d. Pemerataan Kesejahteraan, Pengentasan Kemiskinan, dan Perlindungan Sosial Masyarakat;
- e. Optimalisasi Bonus Demografi melalui Peningkatan Kualitas SDM sebagai Penguatan Fondasi Pembangunan;
- f. Perdagangan Orang (Trafficking);
- g. Perlunya akselerasi Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Good Governance;
- h. Belum meratanya infrastruktur dan akses telekomunikasi di seluruh wilayah Kota Batam, khususnya di wilayah hinterland, yang menghambat pemerataan pembangunan dan transformasi digital;
- i. Pengelolaan Sampah Masih Berbasis Konvensional;
- j. Bencana Akibat Human Error dan Aktivitas Pembangunan.

- k. Meningkatnya Dampak Negatif Arus Informasi di Era Digital pada Karakter dan Norma di Masyarakat

Dari beberapa isu strategis Kota Batam tersebut, yang relevan dan penting bagi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dalam penyelenggaraan layanan dasar bidang ketenagakerjaan adalah:

**a. Persaingan Global**

Kota Batam menghadapi tantangan dalam meningkatkan daya saing global di tengah dinamika ekonomi internasional yang semakin kompleks. Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Batam memiliki potensi besar dalam menarik investasi asing dan meningkatkan nilai ekspor. Namun, persaingan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia menuntut Batam untuk memperkuat infrastruktur, meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan menciptakan regulasi yang mendukung kemudahan berbisnis. Strategi peningkatan daya saing global perlu difokuskan pada pengembangan sektor industri berbasis teknologi tinggi, optimalisasi ekosistem logistik, serta insentif fiskal yang kompetitif untuk menarik lebih banyak investasi asing dan memperkuat posisi Batam sebagai pusat ekonomi di Asia Tenggara.

**b. Pemerataan Kesejahteraan, Pengentasan Kemiskinan, dan Perlindungan Sosial Masyarakat**

Peningkatan daya saing tenaga kerja dan iklim hubungan industrial Meskipun Kota Batam memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kesenjangan sosial dan ekonomi masih menjadi isu yang krusial. Tingkat kemiskinan yang fluktuatif mencerminkan ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan dan akses terhadap kebutuhan dasar. Untuk itu, strategi pemerataan kesejahteraan perlu difokuskan pada penguatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang layak, serta penciptaan lapangan kerja yang inklusif. Peningkatan efektivitas program bantuan sosial berbasis data yang akurat dan integrasi lintas sektor diharapkan mampu mengurangi tingkat kemiskinan secara berkelanjutan dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

**c. Optimalisasi Bonus Demografi melalui Peningkatan Kualitas SDM sebagai Penguatan Fondasi Pembangunan**

Bonus demografi di Kota Batam menjadi peluang besar dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengingat tingginya proporsi penduduk usia produktif. Namun, potensi ini dapat menjadi beban jika kualitas SDM tidak memadai. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan SDM perlu difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri, serta pemerataan akses terhadap pelayanan kesehatan. Dengan menciptakan tenaga kerja yang terampil dan sehat, Batam dapat memanfaatkan bonus demografi sebagai pendorong utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

**d. Perdagangan Orang (Trafficking)**

Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain dan menjadi pusat arus tenaga kerja migran, Kota Batam menghadapi risiko tinggi terkait kasus perdagangan orang. Keterbukaan wilayah serta tingginya jumlah pekerja GAMBARAN UMUM DAERAH | II-220 migran menjadi celah bagi jaringan perdagangan manusia yang memanfaatkan kondisi wilayah Kota Batam yang berbatasan dengan negara lain. Untuk mengatasi isu ini, diperlukan penguatan pengawasan di wilayah perbatasan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan modus perdagangan orang. Selain itu, peningkatan peluang kerja dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi kunci utama dalam mencegah terjadinya kasus trafficking.

**2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Program/kegiatan Tenaga Kerja Kota Batam perlu dilakukan sinkronisasi dengan Ranwal RKPD sehingga dapat dirumusan program/kegiatan definitif untuk diajukan menjadi rencana kerja.

Berikut adalah table 3 (2.3) review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2026 sebagai berikut:

Table 3 (2.3) Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Batam			12.202.876.076	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Batam	- Nilai SAKIP PD - Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	- 73,56 Nilai - 88,00 Nilai	16.398.252.455,74	
1						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100 Persen	23.612.000,00	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	13.612.000,00	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	10.000.000,00	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 Persen	9.521.356.539,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 Persen	12.326.949.393,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/Bulan	9.439.996.539	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/Bulan	12.245.589.393,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	81.360.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	81.360.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana</b>	<b>100 Persen</b>	<b>363.982.381</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya</b>	<b>100 Persen</b>	<b>367.881.500,00</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	185.546.381	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	189.445.500,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	178.436.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	178.436.000,00	
4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>544.723.760</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran</b>	<b>100 Persen</b>	<b>538.992.760</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.627.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.627.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	115.546.965	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	115.546.965	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	60.395.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	152.785.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	105.895.000						
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3.600.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	253.659.795	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lpaoran	261.433.795	
5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi</b>	<b>100 Persen</b>	<b>704.495.364</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>2.462.962.350</b>	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	683.136.000	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	128.318.050	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	128.318.050	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	110.318.050	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	410.218.300	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	465.859.264	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.241.290.000	
6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>767.357.979</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>259.424.400</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	254.961.600	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	259.424.400	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	512.396.379						
7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dalam kondisi baik</b>	<b>100 Persen</b>	<b>300.960.053</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik</b>	<b>100 Persen</b>	<b>418.430.052,74</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	178.510.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	220.390.000	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	66.700.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	102 Unit	72.680.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	102 Unit	81.570.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	49.770.053	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	49.770.053	
II	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>				<b>19.815.636.827</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>		<b>Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi</b>	<b>48,06 Persen</b>	<b>32.172.789.502</b>	
1	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>		<b>Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan</b>	<b>25 Persen</b>	<b>9.509.782.245</b>	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>		<b>Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi</b>	<b>34,01 Persen</b>	<b>18.714.134.782</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	1000 Orang	9.509.782.245	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	1000 Orang	18.714.134.782	
2	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>		<b>Persentase LPK yang terakreditasi</b>	<b>16,67 Persen</b>	<b>758.039.680</b>	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>		<b>Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina</b>	<b>13,33 Persen</b>	<b>198.000.000</b>	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	10 Lembaga	758.039.680	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	10 Lembaga	198.000.000,00	
3	<b>Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>		<b>Persentase perusahaan kecil yang mengikuti program konsultans</b>	<b>20 Persen</b>	<b>250.000.000</b>						
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil		Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	100 Perusahaan	250.000.000						
4	<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase tenaga kerja yang disertifikasi</b>	<b>0,52 Persen</b>	<b>9.297.814.902</b>	<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Jumlah Pekerja yang terfasilitasi dalam peningkatan Produktivitas.</b>	<b>27,68 Persen</b>	<b>13.260.654.720</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1500 Dokumen	9.297.814.902	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1500 Dokumen	13.260.654.720	
III	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>				<b>548.789.856</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>		<b>Persentase tenaga kerja yang terserap /ditempatkan</b>	<b>73,50 Persen</b>	<b>566.278.500</b>	
1	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		<b>Persentase Tenaga Kerja mendapatkan layanan AKAd dan AKL, Penyuluhan, Pemberdayaan dan Tenaga Kerja disabilitas yang diberikan konsultasi</b>	<b>35,29 Persen</b>	<b>138.331.856,00</b>	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		<b>Persentase angkatan kerja (orang yang bekerja dan pencari kerja) yang terlayani</b>	<b>52 Persen</b>	<b>278.985.600</b>	
						Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja		Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	50 Orang	67.264.200	
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan		Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	30 Orang	138.331.856	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan		Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	30 Orang	145.536.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
						Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	75 Orang	66.184.600	
2	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Persentase Informasi lowongan kerja yang ditindaklanjuti pencari kerja	50 Persen	221.908.000	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Persentase ketersediaan informasi kerja yang ditindaklanjuti pencari kerja	76 Persen	106.438.000	
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	2000 Orang	121.908.000	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	200 Orang	106.438.000	
	Job Fair/Bursa Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	1200 Orang	100.000.000						
3	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	23.17 Persen	188.550.000	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Cakupan perlindungan CPMI dan PMI	52.38 Persen	180.854.900	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	380 Orang	84.865.000	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	360 Orang	180.854.900	
	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran		Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	380 Orang	103.685.000						
IV	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>				<b>162.858.008</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>		<b>1. Persentase Penyelesaian Masalah dan Kesejahteraan Sosial Ketenagakerjaan 2. Persentase Pekerja Rentan yang mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan</b>	<b>1. 24.11 Persen 2. 19.56 Persen</b>	<b>2.770.386.600</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Peraturan Perusahaan yang disahkan dan perjanjian kerja bersama yang didaftarkan	100 Persen	81.049.942	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Capaian pengesahan peraturan, perjanjian kerja hubungan industri dan jaminan sosial serta pengupahan perusahaan tenaga kerja	28.96 Persen	413.435.600	
						Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	100 Perusahaan	61.435.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	10 Laporan	81.049.942	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	10 Laporan	352.000.000	
2	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industria</b>	<b>99 Persen</b>	<b>81.808.066</b>	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial serta bantuan iuran JKK dan JKM</b>	<b>19.25 Persen</b>	<b>2.356.951.000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
						Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	20 Perkara	64.410.400	
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	81.808.066	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	196.091.000	
						Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	10285 Orang	2.096.449.600	
	TOTAL				32.730.160.767	TOTAL				51.907.707.057,74	



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Salah satu tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Masyarakat dapat menyampaikan usulan program dan kegiatan kepada pemerintah melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun secara langsung kepada Perangkat Daerah terkait.

Oleh karena itu Dinas Tenaga Kerja Kota Batam akan memperhatikan usulan program dan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat baik melalui Musrenbang maupun yang disampaikan langsung kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam.

Table 4 (2.4) Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan  
Tahun 2026

Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

NO	PEKERJAAN	Lokasi	VOLUME	SATUAN
1	Pelatihan Sertifikasi (rigger)	Batam	35	Orang
2	Pelatihan Bagi Pencari Kerja kecantikan / salonm	Batam	20	Orang
3	Pelatihan Kerja (Welder FCAW 6G, K3 Migas, Listrik dan Forklip)	Batam	31	Orang
4	Pengadaan Pelatihan (Elektik dan Forklip)	Batam	10	Orang
5	pengadaan pelatihan Kuliner	Batam	10	Orang
6	Human Capital Staff Pariwisata Level 3	Batam	25	Orang
7	Human Capital Supervisor Level 4	Batam	21	Orang
8	Human Capital Devision Head level 5	Batam	20	Orang
9	Pelatihan Human Capital level Manager level 6	Batam	19	Orang
10	Pelatihan dan Sertifikasi Microsoft Office Specialist (MOS)	Batam	30	Orang
11	Pelatihan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (Pelatihan Menjahit)	Batam	40	Orang
12	Pelatihan Bagi Pencari Kerja (K3 Muda)	Batam	25	Orang
13	Pelatihan Las/Welder 1-G Bagi Pencari Kerja	Batam	19 >> 20	Orang
14	Pelatihan Bagi Pencari Kerja (BIMTEK FITTER PIPE)	Batam	22 >> 25	Orang
15	Pelatihan Bagi Pencari Kerja (Welder / Las 4G)	Batam	13	Orang

NO	PEKERJAAN	Lokasi	VOLUME	SATUAN
16	Pelatihan Merajut / Menjahit di	Batam	17	Orang
17	Pelatihan Las 3G SMAW,	Batam	14	Orang
18	Sertifikasi Keahlian/ Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja (WELDER 3G, 4G SMAW K3 Migas	Batam	35	Orang
19	Pelatihan Teknisi Elektrik dan NDT	Batam	15	Orang
20	Pelatihan Tata Boga Kue Nasional	Batam	34	Orang
21	Pelatihan (WELDER FCAW),	Batam	15	Orang
22	PELATIHAN (K3 MIGAS OPERATOR)	Batam	20	Orang
23	PELATIHAN & SERTIFIKASI WELDING INSPECTOR BASIC	Batam	15	Orang
24	Pelatihan Welding 5G SMAW Blok 3	Batam	15	Orang
25	PELATIHAN BAHASA INGGRIS BISNIS	Batam	22	Orang
26	PELATIHAN BAHASA KOREA	Batam	17	Orang
27	PELATIHAN K3 UMUM DAN MUDA	Batam	20	Orang
28	PELATIHAN BIMTEK SERTIFIKASI KLASSTER PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS / PARIWISATA	Batam	24	Orang
29	PELATIHAN SALON KECANTIKAN	Batam	19	Orang
30	PELATIHAN PELAYANAN HUBUNGAN INDUSRIAL LEVEL 4	Batam	30	Orang
31	PELATIHAN BIMTEK DAN SERTIFIKASI BAHAS MANDARI BISNIS	Batam	19	Orang
32	PELATIAHAN AUTOCAD MUDA	Batam	23	Orang
33	PELATIHAN BAHASA INGGRIS UNTUK PUBLIC ATTENDANT	Batam	22	Orang
34	Pelatihan Tata Boga dan Tata Rias	Batam	20	Orang
35	Pelatihan Memasak	Batam	34 >> 17	Orang
36	Pelatihan Bagi Pencari Kerja (Pelatihan HRD Supervisor)	Batam	20	Orang
37	PELATIHAN SOFT SKILL & HARD KILL ( PELATIHAN K3 )	Batam	25	Orang
38	Pelatihan Welder 6G GTAW	Batam	12	Orang
39	Pelatihan K3 Migas	Batam	18	Orang
40	Pelatihan Jasa Boga	Batam	20	Orang

NO	PEKERJAAN	Lokasi	VOLUME	SATUAN
41	Pelatihan Menjahit	Batam	18	Orang
42	Pelatihan Fitter Structure dan Pelatihan Pipe Fitter	Batam	18	Orang
43	Pelatihan Gerinda	Batam	18	Orang
44	Pelatihan Welder (5G)	Batam	10	Orang
45	PELATIHAN WELDER 5G SMAW	Batam	15	Orang
46	PELATIHAN SCAFFOLDING QC	Batam	22	Orang
47	Pelatihan Security	Batam	20	Orang
48	Pelatihan Kerja Safety AK3 Umum	Batam	20	Orang
49	Pelatihan Kerja Welder	Batam	15	Orang
50	Bimtek Security Pratama	Batam	10	Orang
51	PELATIHAN KERJA (WELDING SUPERVISOR)	Batam	14	Orang
52	Pelatihan Kerja Menjahit Garmen (Operator Junior)	Batam	20	Orang
53	Pelatihan Welder 5G FCAW	Batam	45	Orang
54	PELATIHAN KOMPUTER	Batam	25	Orang
55	PELATIHAN FITTER	Batam	15	Orang
56	PELATIHAN WELDER	Batam	15	Orang
57	PELATIHAN TATA RIAS RAMBUT	Batam	20	Orang
58	PLATIHAN WELDER GT SMAW	Batam	10	Orang
59	PELATIHAN K3 MUDA	Batam	60	Orang
60	BIMTEK FORKLIF	Batam	40	Orang
61	Pelatihan Ketenaga kerjaan K3 Madya	Batam	25	Orang
62	BIMTEK DAN SERTIFIKASI TOUR GUIDE PARIWISATA	Batam	35	Orang
63	Bimtek Dan Sertifikasi SPA Terapis	Batam	20	Orang
64	Bimtek dan Sertifikasi Teknisi Kelistrikan	Batam	20	Orang
65	Bimtek Dan Sertifikasi Welder 3GSMAW	Batam	15	Orang
66	Bimtek Dan Sertifikasi Master Instruktur Metodologi (TOT) Jenjang 6 S	Batam	12	Orang
67	Pelatihan Ahli K3 Umum	Batam	20	Orang

NO	PEKERJAAN	Lokasi	VOLUME	SATUAN
68	Pelatihan Bimtek dan Sertifikasi 5G SMAW	Batam	15	Orang
69	Pelatihan Keterampilan Menjahit	Batam	20	Orang
70	Pelatihan Ferklif	Batam	30	Orang
71	Pelatihan scaffolding	Batam	30	Orang
72	PELATIHAN DAN SERTIFIKASI WELDER 3G/G6	Batam	15	Orang
73	PELATIHAN JASA BOGA PENGOLAHAN KUE INDONESIA DAN ORIENTAL	Batam	34	Orang
74	PELATIHAN K3 UMUM	Batam	20	Orang
75	PELATIHAN FITTER	Batam	18	Orang
76	Pelatihan Bagi Pencari Kerja (Welder 6 G) FCAW)	Batam	20	Orang
77	Sertifikasi keahlian/ Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Batam	29	Orang
78	Sertifikasi Keahlian/ Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja (Bimtek Tour Leader Wisata)	Batam	38	Orang
79	Bimtek Perizinan bagi Pelaku Usaha Mikro Pemula (Bimtek Human Capital Jenjang Level 6 )	Batam	20	Orang
80	Pelatihan Bagi Pencari Kerja (Front Office Supervisor)	Batam	30	Orang
81	PELATIHAN TATA BOGA ( PASTRY/ BAKERY)	Batam	20	Orang
82	MENJAHIT POLA TINGKAT DASAR	Batam	18	Orang
83	MENJAHIT MODE	Batam	17	Orang
84	PELATIHAN WELDER DASAR	Batam	18	Orang
85	Bimtek dan Sertifikasi Manaje Hubungan Industrial, Jenjang 6	Batam	16	Orang
86	BIMTEK DAN SERTIFIKASI KEPALA BAGIAN REMUNERASI JENJANG 5	Batam	20	Orang
87	PELATIHAN LAS 3G SMAW	Batam	17	Orang
88	Pelatihan Las 5G SMAW	Batam	12	Orang
89	Bimtek dan Sertifikasi Barista	Batam	21	Orang
90	Pelatihan Bartender	Batam	21	Orang
91	Bimtek dan Sertifikasi IT Auditor	Batam	21	Orang

NO	PEKERJAAN	Lokasi	VOLUME	SATUAN
92	Bimtek dan Sertifikasi Front Iffice Supervisor	Batam	24	Orang
93	Bimtek dan Sertifikasi Tour Guide/Pemandu Wisata	Batam	30	Orang
94	Pelatihan Kuliner Tata Boga	Batam	60	Orang
95	Pelatihan Disnaker Pencari Kerja (Satpam)	Batam	20	Orang
96	Pelatihan Digital Marketing	Batam	25	Orang

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM**

**3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Tahap awal upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 dimulai melalui RPJMN 2025-2029 yang berfokus pada penguatan fondasi transformasi. RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi dan program presiden dengan tetap berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045. RPJMN selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra K/L, RPJMD (Provinsi/Kabupaten/Kota) dan RKP serta acuan Badan Usaha/*Non State Actors*.

isi RPJMN 2025-2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" mencerminkan komitmen nasional untuk mewujudkan kemajuan Indonesia dalam rangka mencapai puncak kejayaan pada tahun 2045. Untuk mencapai visi tersebut, misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita dituangkan dalam bentuk Prioritas Nasional yang menjadi landasan utama dalam RPJMN 2025-2029. Prioritas Nasional ini berfungsi sebagai tujuan strategis dan sasaran pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029, yang mencakup berbagai sektor penting seperti pembangunan sumber daya manusia, pemerataan ekonomi, ketahanan pangan, energi berkelanjutan, dan transformasi digital.

Selanjutnya RPJMN 2025-2045 mengusung beberapa misi Presiden yang dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2045. Prioritas Nasional merupakan *goals* periode jangka menengah tahun 2025-2029. Misi Presiden yang disebut sebagai Asta Cita dan dituangkan menjadi Prioritas Nasional tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);;
- 2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- 3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- 4) Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
- 5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
- 7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
- 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Selanjutnya RPJMN 2025-2029 juga memuat 17 Program Prioritas Presiden, yaitu :

- 1) Mencapai swasembada pangan, energi dan air.
- 2) Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara.
- 3) Reformasi hukum, politik dan birokrasi.

- 4) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- 5) Pemberantasan Kemiskinan.
- 6) Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba
- 7) Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.
- 8) Penguatan pendidikan, sains dan teknologi serta digitalisasi.
- 9) Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.
- 10) Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.
- 11) Menjamin pelestarian lingkungan hidup.
- 12) Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani
- 13) Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.
- 14) Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif karakteristik-mandiri lainnya.
- 15) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.
- 16) Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian dan perawatan rumah ibadah.
- 17) Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olah raga.

Berdasarkan Misi/Program Prioritas, Sasaran Utama Pembangunan Nasional dan Proyek Prioritas dalam RPJMN 2025-2029 di atas dan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam mendukung kebijakan nasional 2025-2029 melalui dukungan terhadap misi/prioritas nasional ke-3 yaitu melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam**

Untuk mencapai visi **“BATAM KOTA MADANI YANG INOVATIF, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN SEBAGAI PUSAT INVESTASI DAN PARIWISATA”**, beberapa misi penyelenggaraan pemerintahan periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang akan menumbuhkembangkan kegiatan investasi dan pariwisata yang berdaya saing global.  
Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan yang menitikberatkan pada peningkatan investasi tingkat global. Fokus utama dari misi ini adalah meningkatkan potensi investasi dan pengembangan sektor pariwisata. Dalam meningkatkan investasi daerah, Pemerintah Kota Batam harus mempermudah segala jenis pelayanan perizinan, baik izin usaha, izin kependudukan, izin kepemilikan, izin bangunan, dan sebagainya dengan senantiasa taat pada aturan-aturan yang berlaku
2. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Batam dengan infrastruktur yang menunjang pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Keberadaan infrastruktur akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas bagi faktor-faktor produksi. Selain infrastruktur yang handal, merata dan ramah lingkungan, konektivitas seperti jaringan digital juga menjadi sesuatu yang harus dibangun di era ekonomi digital yang menjadi tantangan dan sekaligus peluang bagi daerah dalam mendorong pemerataan serta daya saing daerah.

3. Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing, produktif dan berakhlak mulia.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Batam untuk menjadi manusia yang berdaya saing, produktif dan berakhlak mulia. Dalam bidang pendidikan dan kesehatan, misi ini diharapkan mampu untuk mengatasi masalah kualitas serta pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan agar semua masyarakat di Kota Batam dapat merasakan penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang adil dan berkualitas sehingga mampu menciptakan generasi yang produktif dan berakhlak mulia.

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang *good governance*.

Misi ini mengarahkan pada peningkatan profesionalisme pemerintah daerah yang dapat berpengaruh pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kota Batam.

Dalam menjalankan pelayanan publik, pemerintah didorong untuk melakukan pelayanan yang maksimal, profesional, bersih, berwibawa, transparan, akuntabel, dan harus senantiasa mengedepankan keadilan sebagai landasan etik dalam melakukan setiap layanan kepada masyarakat.

5. Menjaga kelestarian budaya dan lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Sebagai upaya mendukung konsep pembangunan berkelanjutan sesuai dengan rencana jangka panjang daerah, Kota Batam berupaya mewujudkan Kota Batam sebagai kota yang berbudaya dan berwawasan lingkungan dengan memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin pengelolaan sumber daya alam.

Adapun Misi, tujuan dan sasaran RPJMD yang terkait dengan peran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam ada dalam **Misi Ketiga** yaitu Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing, produktif dan berakhlak mulia.

Hal ini sejalan dengan sasaran yang ingin dicapai dalam mendukung tujuan jangka menengah Dinas Tenaga Kerja Kota Batam yang bisa dilihat pada Tabel 5 (3.1) berikut:

Table 1 (3.1) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja		Angka kesempatan kerja						
		Meningkatkan Pendayagunaan Tenaga Kerja, Pemerataan Kesempatan Kerja, Perlindungan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Pekerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja- TPAK						

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2030 tersebut, dibutuhkan upaya-upaya yang bersifat komprehensif berupa upaya kebijakan, strategis dan program pembangunan ketenagakerjaan dengan melihat kepada isu-isu strategis Pembangunan Ketenagakerjaan yaitu :

1. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM melalui kompetensi kerja, produktivitas kerja, disiplin, sikap dan etos kerja kepada seluruh angkatan kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan yang dibutuhkan oleh pembangunan di Kota Batam.
2. Mewujudkan perluasan kesempatan kerja yang menggambarkan ketersediaan kesempatan kerja dalam jumlah dan kualitas yang memadai/layak bagi seluruh angkatan kerja.
3. Meningkatkan kualitas perangkat hubungan industrial dalam mewujudkan ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha.
4. Mewujudkan kesejahteraan para buruh/pekerja/karyawan dan keluarganya melalui sistem pengupahan yang berkeadilan dan layak.
5. Peningkatan efektifitas peran perencanaan tenaga kerja yang merupakan guidance dalam pemecahan berbagai permasalahan ketenagakerjaan di masa yang akan datang sehingga mampu mengarahkan pembangunan ketenagakerjaan kepada tujuan utama pembangunan ketenagakerjaan dan agenda SDGs.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Melihat dari isu-isu strategis Pembangunan Ketenagakerjaan seperti yang telah diuraikan diatas, didapatkan kebijakan pemecahan masalah ketenagakerjaan berdasarkan skala prioritas yang dituang dalam program, kegiatan dan subkegiatan. Strategi pemecahan permasalahan masalah ketenagakerjaan tersebut sebagai berikut :

1. Peningkatan efektifitas peran perencanaan tenaga kerja yang merupakan guidance dalam pemecahan berbagai permasalahan ketenagakerjaan di masa yang akan datang sehingga mampu mengarahkan pembangunan ketenagakerjaan kepada tujuan utama pembangunan ketenagakerjaan dan agenda SDGs.
2. Memberdayakan dan mendayagunakan angkatan kerja secara optimal dan manusiawi.
3. Mewujudkan kesempatan kerja yang menggambarkan ketersediaan kesempatan kerja dalam jumlah dan kualitas yang memadai/layak bagi seluruh angkatan kerja.
4. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas kerja, disiplin, sikap dan etos kerja kepada seluruh angkatan kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan yang dibutuhkan oleh pembangunan daerah.
5. Produktivitas tenaga kerja yang menggambarkan tenaga kerja daerah dalam menghasilkan barang dan jasa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke level yang tinggi.
6. Efektifitas hubungan industrial dalam mewujudkan ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha (industrial peace) sehingga dapat mendorong produktifitas tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja.
7. Mewujudkan kesejahteraan para buruh/pekerja/karyawan dan keluarganya melalui sistem pengupahan yang berkeadilan dan layak.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan pada tahun 2026 tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota**

**1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

**2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;

**3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;

**4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
  - 5) **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:**
    - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
    - Pengadaan Mebel;
    - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
    - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
  - 6) **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:**
    - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - 7) **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:**
    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
    - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
    - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- b. **Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja**
- 1) **Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**
    - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
  - 2) **Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**
    - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.
  - 3) **Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
    - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
- c. **Program Penempatan Tenaga Kerja**
- 1) **Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**
    - Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja
    - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
    - Perluasan Kesempatan Kerja
  - 2) **Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.**
    - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
  - 3) **Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**
    - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
- d. **Program Hubungan Industrial**
- 1) **Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**
    - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan;
    - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan;
  - 2) **Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**
    - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
    - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
    - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam  
Tahun 2026 adalah berikut :

Table 2 (3.2) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027  
Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>DINAS TENAGA KERJA</b>				<b>51.907.707.057,74</b>			<b>2.526.482.930,00</b>
	<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		Batam		<b>51.907.707.057,74</b>			<b>2.526.482.930,00</b>
	<b>2.07</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>		Batam		<b>51.907.707.057,74</b>			<b>2.526.482.930,00</b>
<b>1,</b>	<b>2.07.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>- Nilai Sakip Perangkat Daerah - Indeks Pelayanan Keseekretariatan PD</b>	<b>Batam</b>	<b>- 72,66% - 86%</b>	<b>16.398.252.455,74</b>		<b>- 74,06% - 88%</b>	<b>16.004.499.495,00</b>
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	Batam	100 Persen	23.612.000,00		100 Persen	23.612.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Batam	2 Dokumen	13.612.000,00		3 Dokumen	13.612.000,00
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Batam	3 Laporan	10.000.000,00		3 Laporan	10.000.000,00
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	Batam	100 Persen	12.326.949.393,00		100 Persen	13.327.949.393,00
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Batam	63 Orang/bulan	12.245.589.393,00		65 Orang/Bulan	13.245.589.393,00
	2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Batam	12 Dokumen	81.360.000,00		12 Dokumen	82.360.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Batam	100 Persen	367.881.500,00		100 Persen	320.053.000,00
	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Batam	63 Paket	189.445.500,00		63 Paket	141.750.000,00
	2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Batam	11 Orang	178.436.000,00		11 Orang	178.303.000,00
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	Batam	100 Persen	538.992.760,00		100 Persen	595.231.802,50
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Batam	4 Paket	5.627.000,00		4 Paket	11.254.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Batam	34 Paket	115.546.965,00		34 Paket	121.324.313,25
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Batam	4 Paket	152.785.000,00		4 Paket	156.604.625,00
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Batam	3 Dokumen	3.600.000,00		3 Dokumen	5.400.000,00
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Batam	12 Laporan	261.433.795,00		12 Laporan	300.648.864,25

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	Batam	100 Persen	2.462.962.350,00		100 Persen	892.662.800,00
	2.07.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Batam	2 Unit	683.136.000,00		1 Unit	341.568.000,00
	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel							
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Batam	39 Unit	128.318.050,00		40 Unit	200.000.000,00
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Batam	51 Unit	410.218.300,00		27 Unit	351.094.800,00
	2.07.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Batam	1 Unit	1.241.290.000,00		0	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	Batam	100 Persen	259.424.400,00		100 Persen	285.366.840,00
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Batam	12 Laporan	259.424.400,00		12 Laporan	285.366.840,00
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	Batam	100 Persen	418.430.052,74		100 Persen	583.235.659,00
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Batam	6 Unit	220.390.000,00		6 Unit	242.429.000,00
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Batam	3 Unit	66.700.000,00		3 Unit	73.370.000,00
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Batam	106 Unit	81.570.000,00		106 Unit	85.648.500,00
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Batam	2 Unit	49.770.052,74		3 Unit	121.788.159,00
	2.07.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan: Unit)	Batam				3 Unit	60.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2,	2.07.03	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi</b>	<b>Batam</b>	<b>48,06%</b>	<b>32.172.789.502,00</b>		<b>64,70%</b>	<b>36.938.185.644,85</b>
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Batam	34.01 Persen	18.714.134.782,00		50,21 Persen	19.249.051.607,00
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi							
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Batam	1749 Orang	18.714.134.782,00		2000 Orang	19.249.051.607,00
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	Batam	13.33 Persen	198.000.000,00		13.33 Persen	150.000.000,00
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta							
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Batam	20 Lembaga	198.000.000,00		20 Lembaga	150.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Pekerja yang terfasilitasi dalam peningkatan Produktivitas	Batam	27.68 Persen	13.260.654.720,00		44,29 Persen	17.539.134.037,85
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja							
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Batam	1500 Dokumen	13.260.654.720,00		1700 Dokumen	17.539.134.037,85
3,	2.07.04	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase tenaga kerja yang terserap /ditempatkan</b>	<b>Batam</b>	<b>73,50%</b>	<b>566.278.500,00</b>		<b>75%</b>	<b>1.154.764.300,00</b>
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase angkatan kerja (orang yang bekerja dan pencari kerja) yang terlayani	Batam	52 Persen	278.985.600,00		54 Persen	641.721.400,00
	2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja							
			Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain- lain untuk Peningkatan Kompetensi	Batam	50 Orang	67.264.200,00		100 Orang	300.000.000,00
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	Batam	25 Orang	145.536.800,00		25 Orang	160.536.800,00
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja							
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Batam	30 Orang	66.184.600,00		30 Orang	81.184.600,00
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase ketersediaan informasi kerja yang ditindaklanjuti pencari kerja	Batam	76 Persen	106.438.000,00		79,01 Persen	324.688.000,00
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online							
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Batam	2100 Orang	106.438.000,00		2200 Orang	131.438.000,00
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan perlindungan CPMI dan PMI	Batam	52.38 Persen	180.854.900,00		54,55 Persen	188.354.900,00
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Batam	500 Orang	180.854.900,00		500 Orang	188.354.900,00
4,	<b>2.07.05</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	1. Persentase Pekerja Rentan yang mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan 2. Persentase Penyelesaian Masalah dan Kesejahteraan Sosial Ketenagakerjaan	Batam	24,11 Persen	<b>2.770.386.600,00</b>		<b>41,83 Persen</b>	<b>3.002.151.000,00</b>
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian pengesahan peraturan, perjanjian kerja hubungan industri dan jaminan sosial serta pengupahan perusahaan tenaga kerja	Batam	28.96 Persen	413.435.600,00		44,76 Persen	604.200.000,00
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan							
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Batam	200 Perusahaan	61.435.600,00		220 Perusahaan	187.000.000,00
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Batam	1 Laporan	352.000.000,00		1 Laporan	387.200.000,00
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial serta bantuan iuran JKK dan JKM	Batam	19.25 Persen	2.356.951.000,00		39,90 Persen	2.397.951.000,00
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Batam	100 Perkara	64.410.400,00		110 Perkara	72.910.400,00
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota							
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Batam	1 Lembaga	196.091.000,00			-
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja							
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Batam	10285 Orang	2.096.449.600,00		9900 Orang	2.108.949.600,00
	J U M L A H					51.907.707.057,74			57.099.600.439,00



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 dengan tetap memperhatikan Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam pada Tahun 2026 tetap merujuk pada target RPJMD Kota Batam Tahun 2026, Pagu Indikatif, lokasi kegiatan, serta SDM dan sarana penunjang lainnya yang dapat menentukan keberhasilan suatu program dan kegiatan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan guna menunjang ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2026 ini, maka disusun beberapa Program dan Kegiatan terkait penyelenggaraan kesejahteraan pekerja di Kota Batam oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. Ada 4 Program, 15 kegiatan dan 34 Sub Kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2026 dengan Rencana Anggaran sebesar Rp. **51.907.707.057,74,-** yang digunakan untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Non-Urusan dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar sebagaimana tabel dibawah ini :

Table 7 (4.1) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027  
Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>DINAS TENAGA KERJA</b>				<b>51.907.707.057,74</b>			<b>2.526.482.930,00</b>
	<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		Batam		<b>51.907.707.057,74</b>			<b>2.526.482.930,00</b>
	<b>2.07</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>		Batam		<b>51.907.707.057,74</b>			<b>2.526.482.930,00</b>
<b>1,</b>	<b>2.07.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>- Nilai Sakip Perangkat Daerah - Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD</b>	<b>Batam</b>	<b>- 73,56% - 86%</b>	<b>16.398.252.455,74</b>		<b>- 74,06% - 88%</b>	<b>16.004.499.495,00</b>

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	Batam	100 Persen	23.612.000,00		100 Persen	23.612.000,00
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Batam	2 Dokumen	13.612.000,00		3 Dokumen	13.612.000,00
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Batam	3 Laporan	10.000.000,00		3 Laporan	10.000.000,00
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	Batam	100 Persen	12.326.949.393,00		100 Persen	13.327.949.393,00
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Batam	63 Orang/bulan	12.245.589.393,00		65 Orang/Bulan	13.245.589.393,00
	2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Batam	12 Dokumen	81.360.000,00		12 Dokumen	82.360.000,00
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Batam	100 Persen	367.881.500,00		100 Persen	320.053.000,00
	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Batam	63 Paket	189.445.500,00		63 Paket	141.750.000,00
	2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Batam	11 Orang	178.436.000,00		11 Orang	178.303.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	Batam	100 Persen	538.992.760,00		100 Persen	595.231.802,50
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Batam	4 Paket	5.627.000,00		4 Paket	11.254.000,00
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Batam	34 Paket	115.546.965,00		34 Paket	121.324.313,25
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Batam	4 Paket	152.785.000,00		4 Paket	156.604.625,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Batam	3 Dokumen	3.600.000,00		3 Dokumen	5.400.000,00
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Batam	12 Laporan	261.433.795,00		12 Laporan	300.648.864,25
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	Batam	100 Persen	2.462.962.350,00		100 Persen	892.662.800,00
	2.07.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Batam	2 Unit	683.136.000,00		1 Unit	341.568.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel							
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Batam	39 Unit	128.318.050,00		40 Unit	200.000.000,00
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Batam	51 Unit	410.218.300,00		27 Unit	351.094.800,00
	2.07.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Batam	1 Unit	1.241.290.000,00		0	-
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	Batam	100 Persen	259.424.400,00		100 Persen	285.366.840,00
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Batam	12 Laporan	259.424.400,00		12 Laporan	285.366.840,00
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	Batam	100 Persen	418.430.052,74		100 Persen	583.235.659,00
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Batam	6 Unit	220.390.000,00		6 Unit	242.429.000,00
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Batam	3 Unit	66.700.000,00		3 Unit	73.370.000,00
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Batam	106 Unit	81.570.000,00		106 Unit	85.648.500,00
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Batam	2 Unit	49.770.052,74		3 Unit	121.788.159,00
	2.07.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan: Unit)	Batam				3 Unit	60.000.000,00
2,	2.07.03	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi</b>	<b>Batam</b>	<b>48,06%</b>	<b>32.172.789.502,00</b>		<b>64,70%</b>	<b>36.938.185.644,85</b>

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Batam	34.01 Persen	18.714.134.782,00		50,21 Persen	19.249.051.607,00
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi							
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Batam	1749 Orang	18.714.134.782,00		2000 Orang	19.249.051.607,00
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	Batam	13.33 Persen	198.000.000,00		13.33 Persen	150.000.000,00
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta							
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Batam	20 Lembaga	198.000.000,00		20 Lembaga	150.000.000,00
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Pekerja yang terfasilitasi dalam peningkatan Produktivitas	Batam	27.68 Persen	13.260.654.720,00		44,29 Persen	17.539.134.037,85

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja							
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Batam	1500 Dokumen	13.260.654.720,00		1700 Dokumen	17.539.134.037,85
3,	2.07.04	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase tenaga kerja yang terserap /ditempatkan</b>	<b>Batam</b>	<b>73,50%</b>	<b>566.278.500,00</b>		<b>75%</b>	<b>1.154.764.300,00</b>
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase angkatan kerja (orang yang bekerja dan pencari kerja) yang terlayani	Batam	52 Persen	278.985.600,00		54 Persen	641.721.400,00
	2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja							
			Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain- lain untuk Peningkatan Kompetensi	Batam	50 Orang	67.264.200,00		100 Orang	300.000.000,00
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Batam	25 Orang	145.536.800,00		25 Orang	160.536.800,00
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja							
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Batam	30 Orang	66.184.600,00		30 Orang	81.184.600,00
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase ketersediaan informasi kerja yang ditindaklanjuti pencari kerja	Batam	76 Persen	106.438.000,00		79,01 Persen	324.688.000,00
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online							
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Batam	2100 Orang	106.438.000,00		2200 Orang	131.438.000,00
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan perlindungan CPMP dan PMI	Batam	52.38 Persen	180.854.900,00		54,55 Persen	188.354.900,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)							
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Batam	500 Orang	180.854.900,00		500 Orang	188.354.900,00
4,	<b>2.07.05</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	1. Persentase Pekerja Rentan yang mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan 2. Persentase Penyelesaian Masalah dan Kesejahteraan Sosial Ketenagakerjaan	Batam	1. 24,11 Persen 2. 19.56 Persen	<b>2.770.386.600,00</b>		<b>41,83 Persen</b>	<b>3.002.151.000,00</b>
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian pengesahan peraturan, perjanjian kerja hubungan industri dan jaminan sosial serta pengupahan perusahaan tenaga kerja	Batam	28.96 Persen	413.435.600,00		44,76 Persen	604.200.000,00
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Batam	200 Perusahaan	61.435.600,00		220 Perusahaan	187.000.000,00
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan							
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Batam	1 Laporan	352.000.000,00		1 Laporan	387.200.000,00
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial serta bantuan iuran JKK dan JKM	Batam	19.25 Persen	2.356.951.000,00		39,90 Persen	2.397.951.000,00
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Batam	100 Perkara	64.410.400,00		110 Perkara	72.910.400,00
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Batam	1 Lembaga	196.091.000,00			-
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja							
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Batam	10285 Orang	2.096.449.600,00		9900 Orang	2.108.949.600,00
	<b>J U M L A H</b>					<b>51.907.707.057,74</b>			<b>57.099.600.439,00</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam pada Tahun 2026 khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya, serta didasarkan pada lintas program melalui mekanisme yang partisipatif, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Batam yang menjadi tanggung jawab Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam.

Sebagai dokumen rencana resmi daerah, diharapkan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja kota Batam Tahun 2026 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarnya.

#### **5.1 Catatan Penting**

Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2025-2029 serta berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026, perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029.

Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2026 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan. Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2026 terdiri atas 4 (empat) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan. Dokumen Renja ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.

#### **5.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan**

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2025-2029 yang di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan Tahun 2026 yang dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RKPD Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota Batam dan Renstra Perangkat Daerah;
2. Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang menjadi dasar dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN.

### 5.3 Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2026 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku;
2. Peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh aparatur Pemerintah Kota Batam terhadap perencanaan dan pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2026 dengan efektif dan efisien;
3. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks dengan upaya melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur baik melalui luring maupun daring;
4. Dalam menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, maka seluruh aparatur Dinas Tenaga Kerja Kota Batam secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2026.

Demikian Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2026 yang telah kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dalam pelayanan kepada masyarakat.

WALI KOTA BATAM



AMSAKIR ACHMAD